

**IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA PADA PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG TERMINAL
PETIKEMAS PELABUHAN PANTOLOAN**

**IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT
SYSTEMS ON WORKERS OF PANTOLOAN PORTOLATE PORTOLINES
OF GOODS OF TERMINAL PETIKEMAS**

¹Lucito Setiawan, ²Sudirman, ³Mohammad Andri

^{1,2,3}Bagian AKK, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : lucisetiawan09@gmail.com)

(Email: sudirman.aulia@gmail.com)

(Email : Moh.andri76@yahoo.com)

Alamat Koresponden :

Lucito Setiawan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Muhammadiyah Palu

Email : lucisetiawan09@gmail.com

HP : +62 85394167139

ABSTRAK

Upaya keselamatan dan kesehatan harus dilakukan di semua tempat, khususnya di PT. Pelindo IV Pantoloan termasuk stasiun kerja dengan berbagai jenis bahaya yang menyebabkan PT. Pihak Pelindo IV Pantoloan harus menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan di terminal peti kemas Pantoloan.harbor. Ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan keamanan kerja di terminal petikemas pelabuhan Pantoloan yang tidak maksimal berada di bawah wewenang PT. Pantoan Pemprovindo karena sumber daya manusia dalam melaksanakan program kesehatan dan sistem manajemen keselamatan kerja masih hanya satu orang, dan peralatan perlindungan pribadi yang dimiliki oleh pekerja bongkar muat sangat minimum dan pekerja tidak melakukan koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas K3 di Pelindo untuk menyediakan peralatan perlindungan pribadi dan kurangnya pengetahuan buruh tentang pentingnya penggunaan peralatan perlindungan pribadi. Diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk melaksanakan satu kebijakan dan diperlukan koordinasi antara pihak-pihak yang bertanggung jawab di atas kapal, karyawan dan pihak PT. Pelindo sebagai penanggung jawab program kesehatan dan keselamatan kerja agar program kesehatan dan keselamatan kerja manajemen dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Kata Kunci : komunikasi, disposisi, sumber daya, struktur birokrasi

ABSTRACT

Safety and health effort must be carried out at all places, particularly, in PT. Pelindo IV Pantoloan include work station with various kinds of danger that why PT. Pelindo IV Pantoloan party should apply work safety and health effort by implementing system of health management and work safety (SMK3). The objective of this research is to find out the implementation of work safety and health management system at container terminal of Pantoloan harbor. This is a qualitative research that used technique of data collection, observation, in-depth interview and documentation. Research findings show that work safety and health security management system at container terminal of Pantoloan harbor which is not maximally under the authority of PT. Pelindo Pantoloan department because human resource in implementing program of health and work safety management system is still only one person, and equipment of personal protection which is owned by laborer of loading and unloading is very minimum and laborers do not do coordination to the party who is responsible for K3 in Pantoloan to provide personal protection equipment and the lack of laborer knowledge about the importance of personal protection equipment usage. It is needed the addition of human resource to implement one policy and it is required coordination between parties who are responsible on board, employees and PT. Pelindo party as person in charge of health and work safety program in order that program of health and work safety management can run suitable with expectation.

Keywords : communication, disposition, resource, bureaucratic structure

PENDAHULUAN

Tenaga kerja bongkar muat pelabuhan merupakan bagian dari pekerja informal. Peraturan Menteri No 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, mengatur kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan terbagi dalam tiga bagian terdiri dari stevedoring, corgodoring dan receiving atau delivery serta melakukan berbagai aktivitas fisik manual material handling seperti mengangkat, menahan dan memindahkan barang (Anonim, 2009).

Dalam kegiatan bongkar muat tersebut banyak stakeholder yang terlibat ketika kapal bersandar di dermaga pelabuhan. Mulai dari operator terminal atau penyedia sarana pelabuhan, perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat (PBM), sampai pengelola tenaga kerja bongkar muat (TKBM). (Wiyadi 2013).

Terlibatnya berbagai unsur perusahaan tersebut tidak berarti bahwa penerapan dan pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) telah maksimal. Padahal, kegiatan bongkar muat dengan operasional yang tinggi tersebut menyebabkan berbagai risiko terutama risiko terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. (Prihandono 2010).

diketahui bahwa TKBM yang bekerja di atas kapal berisiko terpeleset, tersandung, dan kejatuhan benda. Besarnya risiko mengindikasikan bahwa kegiatan bongkar muat petikemas di Terminal Pelabuhan Pantoloan rawan terjadi kecelakaan kerja. salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menggunakan APD (Alat Pelindung

Diri) secara tepat. APD merupakan suatu alat atau pengaman yang berguna untuk melindungi atau meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka untuk mencegah ataupun meminimalisir akibat yang ditimbulkan karena adanya kecelakaan kerja seperti di atas, maka TKBM yang bekerja di atas kapal dengan risiko terpeleset, tersandung, dan atau kejatuhan benda tertentu, diharuskan menggunakan APD antara lain seperti safety shoes, helm pengaman, rompi skotlet, pelatihan handling petikemas secara berkala, dan melakukan safety briefing setiap hari sebelum melakukan pekerjaan serta pemberian rambu peringatan di deck kapal (Prihandono, 2010).

Dalam prariset yang dilakukan peneliti, ternyata kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Samudera Bitung dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat sebanyak 934 orang yang sebagian besar berusia antara 19 - 55 tahun. Tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Samudera Bitung terbagi dalam beberapa regu kerja dengan tugas masing-masing dan cara kerja yang berbeda. Hasil wawancara dengan beberapa tenaga kerja bongkar muat, didapat bahwa sebagian besar mengatakan merasa lelah karena masih bekerja dengan cara manual untuk mengangkut muatan berlebihan seperti semen, beras, karnel dan kopra dari dan ke kapal hingga berulang kali menggunakan kekuatan sendiri tanpa alat bantu.

Data dari International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa setiap tahun sebanyak dua juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan (Markanen, 2004).

Kelelahan kerja di Indonesia termasuk masalah kesehatan nasional. Hasil penelitian di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Surabaya tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 47 tenaga kerja sebagian besar mengalami tingkat kelelahan sedang yaitu 27 orang (57,4%) dan 20 orang (42,6%) mengalami tingkat kelelahan ringan (Andrias, 2011), juga penelitian yang dilakukan oleh Tyas (2010) pada sebagian besar pekerja di wilayah Medan, Samarinda, Maluku dan Surabaya yang terpajan panas, ternyata mengalami kelelahan ringan.

Demikian pula hasil penelitian Eraliesa (2009), menunjukkan sebagian besar buruh pada bagian stevedoring dan receiving pelabuhan Tapaktuan Aceh mengalami kelelahan. Kelelahan dalam bekerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: umur, masa kerja, status gizi, asupan nutrisi, status perkawinan, gangguan muskuloskeletal, olahraga, kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol dan penyalahgunaan obat. Sedangkan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi kelelahan meliputi tinggi meja, iklim kerja, pencahayaan, tingkat pendapatan, kesempatan merubah sikap atau posisi bekerja, pakaian sepatu, kondisi lantai dan shift kerja (Atiqoh, Wahyuni dan Lestantyo, 2014).

Tingkat kelelahan akibat kerja yang dialami pekerja dapat menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakpuasan dan penurunan produktivitas yang ditunjukkan dengan berkurangnya kecepatan performansi, menurunnya mutu produk, meningkatnya kesalahan dan kerusakan, kecelakaan yang sering terjadi, kendornya perhatian serta ketidaktepatan dalam melaksanakan pekerjaan (Tarwaka, 2010).

Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan tempat, peralatan dan lingkungan kerja adalah sangat perlu diutamakan. Namun kadangkadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga digunakan alat-alat pelindung diri. Alat pelindung haruslah enak dipakai, tidak mengganggu kerja dan memberikan perlindungan yang efektif (Suma'mur, 2009).

Administratif, penggantian biaya kesehatan bersifat ritel dan terjadi secara harian. Rincian detil informasi yang terkandung dalam proses penggantian biaya penyembuhan memerlukan disiplin administrasi yang tinggi biaya penyediaan fasilitas kesehatan meningkat setiap tahun. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa biaya setiap jenis pelayanan kesehatan setiap tahunnya meningkat lebih tinggi dari tingkat inflasi umum. Resiko yang dihadapi sakit tidak mengenal siapa, kapan dan dimana. Serangan penyakit dapat terjadi terhadap setiap karyawan setiap saat. Dari sudut pandang perusahaan ketidakpastian terjadinya penyakit, jenis dan proses penyembuhan memunculkan resiko penyediaan biaya yang besarnya tidak dapat diduga. (suma'mur2009).

Kecelakaan kerja bersifat tidak menguntungkan, tidak dapat diramal, tidak dapat dihindari sehingga tidak dapat diantisipasi dan interaksinya tidak disengaja. Berdasarkan penyebabnya, terjadinya kecelakaan kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Adapun sebab kecelakaan tidak langsung terdiri dari faktor lingkungan (zat kimia yang tidak aman, kondisi fisik dan mekanik) dan faktor manusia (lebih dari 80%). Pada umumnya kecelakaan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan, kurangnya pengawasan, kompleksitas dan keanekaragaman ukuran organisasi, yang kesemuanya mempengaruhi kinerja keselamatan dalam industri konstruksi (Anizar, 2009).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau *interview* dan dokumen. Penelitian ini akan dilaksanakan di Terminal Pelabuhan Petikemas Pantoloan. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli tahun 2018. Sampel penelitian dimulai dari informan yang dirasa bisa memberikan informasi dan keterangan sebagai langkah awal dari penelitian untuk menentukan sampel dan bergulir

ke sampel lainnya sampai informasi yang didapatkan sudah jenuh atau di simpulkan oleh peneliti sudah memenuhi syarat untuk memulai analisis. Jumlah sampel dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan terlebih dahulu karena dalam proses pengumpulan data bisa bervariasi. Informasi tidak ditemukan lagi maka peneliti tidak perlu lagi melanjutkan mencari informasi atau sampel baru, sebaliknya bila informasi yang diterima selalu berbeda dari temuan sebelumnya, maka peneliti harus terus mencari sampel baru. Informan dalam penelitian adalah pekerja bongkar muat barang yang berjumlah 10 orang, dan 1 yaitu General Manager Pelindo IV cabang Pantoloan Terminal Petikemas Pelabuhan Pantoloan sebagai informan kunci. Yang diambil dengan menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sample*. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, dan pengamatan (*observasi*). Teknik pengolahan data dilakukan secara manual dengan tahapan :

1. Mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi dengan menggunakan alat bantu perekam data berupa hand phone, dan alat tulis.
2. Untuk data yang diperoleh dengan wawancara (data emik) selanjutnya diklasifikasikan menurut dimensi penelitian dan dibuat dalam bentuk matriks.
3. Dengan memahami matriks data hasil pernyataan informan selanjutnya dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan penting, dicari tema dan polanya kemudian dinyatakan sebagai reduksi atau kesimpulan.
4. Kesimpulan kemudian dikaji kembali menjadi konsep emik atau konsep berdasarkan pernyataan informan dan sesuai dengan variable penelitian.
5. Konsep emik yang telah diproses selanjutnya dibandingkan dengan teori yang sudah ada dan terkait dengan dimensi penelitian menurut pandangan peneliti (konsep etik)
6. Selanjutnya dibangun sebuah hubungan yang logis antara dua konsep yang disebut sebagai preposisi.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil survey tersebut pada tahun 1975 dibangun pelabuhan pantoloan yang merupakan pelabuhan alternatif dalam rangka menunjang kegiatan angkutan laut dan kepelabuhanan, penyediaan sarana dan prasarananya terus ditingkatkan baik fasilitas-fasilitas pelabuhan maupun penunjang angkutan laut.

Pada tahun 1978 pembangunan pelabuhan pantoloan selesai dilaksanakan dan diresmikan oleh Menteri Perhubungan saat itu Roesmin Noerjadin. Sejak beroperasinya pelabuhan pantoloan, kegiatan Pelabuhan Donggala lebih diarahkan untuk pelayaran rakyat.

Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan pantoloan terus ditingkatkan baik melalui anggaran apbn maupun yang bersumber dari bantuan laur negeri.

Status Pelabuhan Pantoloan merupakan pelabuhan yang diusahakan, dalam segi pengusahaannya dikelola oleh PT. (Persero) Pelindo IV cabang Pantoloan sedangkan dari segi pemerintahannya dilaksanakan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Pantoloan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Menyusun rencana proses pengadaan yang akan dilakukan oleh perusahaan, baik di kantor pusat maupun di cabang, sehingga dapat dikoordinasikan dengan baik dan sesuai target waktu yang diinginkan. Mengelola kebutuhan layanan administrasi dari semua proses pengadaan, termasuk dalam menyiapkan dokumen pengadaan dan Mengelola pelaksanaan seluruh tahapan proses pengadaan baik pengadaan fisik, pengadaan non fisik, maupun pengadaan lainnya, untuk setiap jenis pengadaan di perusahaan, termasuk koordinasi pengadaan di cabang.

b. Fungsi

menyiapkan pembinaan dan pengembangan sistem logistik perusahaan, menyusun program kerja serta menyelenggarakan kegiatan logistik perusahaan, yang meliputi pengadaan, perbekalan, pendistribusian, dan pengendalian, pengadaan bidang teknik dan non teknik, serta pengolahan administrasi pengadaan barang dan jasa.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan di peroleh dan diperoleh informasi dari petugas yang ada di PT.Pelindo Pantoloan, bahwa di PT.Pelinndo Pantoloan sudah diterapkan dan diimplementasikan kebijakan tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) namun belum maksimal. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan di PT.Pelindo Pantoloan dengan melihat pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang merupakan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) dengan melihat Sumber Daya Manusia (SDM), pemahaman tentang pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada pegawai atau kariawan masi terdapat kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya suatu pelaksanaan program Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti memberikan kesimpulan bahwa komunikasi merupakan yang harus rutin dilakukan antara pengambil kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan, baik pelaksana dalam memegang program dan sebagai penggerak suatu program seperti petugas yang melakukan suatu pekerjaan yang beresiko suatu kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Informasi tentang suatu pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di pelabuhan disampaikan kepada pihak penanggung jawab untuk selalu memberikan informasi kepada semua buruh atau pekerja yang berada di area pelabuhan untuk selalu menggunakan Alat Pelindung Diri agar terhindar dari kecelakaan akibat kerja yang tidak diinginkan agar Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan untuk PT. Pelindo agar menambah kariawan yang ada di kantor dalam bidang penanggung jawab program K3. Maka peneliti menyarankan kepada pihak PT. Pelindo IV Pantoloan perlu dilakukan pendataan kembali kepada buruh atau tenaga kerja yang belum memiliki Alat Pelindung Diri agar program tersebut berjalan dengan maksimal, melakukan penambahan Sumber Daya berupa staf untuk dibidang program keselamatan dan kesehatan kerja dengan melakukan pelatihan kembali kepada anggota yang baru direkrut dan melakukan kordinasi dengan setiap kegiatan yang dilaksanakan agar tercapainya sesuai dengan yang diinginkan dan pengawasan secara maksimal dengan melakukan evaluasi demi terccapainya suatu perubahan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009 Peraturan Menteri No 61 tahun 2009 “tentang kepelabuhanan”.
- Anizar. 2009. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri. Yogyakarta: Graham Ilmu
- Agustino. Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Edward III, George C. (1980), Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington
- Kurniawidjaja, M. L. 2010. Teori Dan Aplikasi Kesehatan Kerja. UI Press, Jakarta
- Kurniawidjaja M. Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja. Jakarta: UI-Press; 2010.
- Lucito. 2018. Studi Pendahuluan Tentang Pemasalahan Yang Ada Di Terminal Petikemas Pelabuhan Pantoloan (tidak Di Publikasikan) Fkm Unismuh Palu.
- Liono & Sutardji 2010. Sistem Manajemen K3 “ Kebijakan, Penyediaan Alat, Pelaksanaan, Pengukuran dan Evaluasi” .
- Mondy, R. Wnyne. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga.

- Malik. 2013. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Maleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurfadilah And Indra yadi 2014. Tujuan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
- Prihandono, E, Analisa Risiko Kegiatan Operasional Bongkar Muat Petikemas Di Dermaga Nilam Timur Multipurpose Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Tesis, Magister Manajemen Teknik, MMT, ITS, 2010.
- Prohandono. 2010. "Penerapan dan Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3).
- PERMENAKER PER-05/MEN/1996. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Suma'mur. 2009. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes). Sagung Seto:Jakarta
- Tyas, Andrian. 2011. "Masalah Kesehatan Nasional PT. Indofood surabaya Tahun 2011.
- Tarwaka. 2010. Ergonomi Industri. Surakarta : HARAPAN PRESS.
- Wiyadi. 2013. "Tentang Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Tenaka Kerja Bongkar Muat (TKBM).
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).